



RILIS
KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN
KOMISI X DPR RI KE KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 28—30 NOVEMBER 2024

=====

Komisi X DPR RI melaksanakan Kunker Spesifik Bidang Pendidikan ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 tanggal 28—30 November 2024 dipimpin oleh Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom. M.M. Kunker Spesifik ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan para pemangku kepentingan pendidikan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, melihat secara langsung Implementasi dari Permendikbudristekdikti Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) sebagai Merdeka Belajar Episode 25.

Kunjungan diterima oleh Penjabat Sementara Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa S.STP, M.Si. beserta jajarannya yang dihadiri oleh Pimpinan/Anggota DPRD Kota Pekanbaru, kepala dinas pendidikan, balai besar penjaminan mutu pendidikan, komite sekolah, dewan pendidikan daerah, dan para pemangku kepentingan bidang pendidikan lain di Kota Pekanbaru. Kunjungan kerja ini juga dilakukan dengan peninjauan lapangan ke SMP Negeri 15 Kota Pekanbaru.

Implementasi dari Permendikbudristekdikti Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) sebagai Merdeka Belajar Episode 25 telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan mengeluarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Namun data kasus perundungan dan kekerasan pada peserta didik di satuan pendidikan di Kota Pekanbaru pada tahun 2023 terdapat 4 kasus yaitu 3 kasus hak anak dan 1 kasus kekerasan seksual sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 12 kasus yaitu 2 kasus hak anak, 5 kasus kekerasan seksual, 4 kasus kekerasan fisik dan 1 kasus kekerasan psikis.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru diantaranya, (1) belum terorganisirnya penanganan kekerasan di satuan pendidikan. (2) masih banyak korban/terlapor melaporkan kekerasan kepada pihak berwajib bukan ke Satgas/TPPK. (3) tidak adanya alokasi anggaran Satgas untuk sosialisasi kebijakan dan program pencegahan kekerasan serta memberikan pelatihan TPPK dan satuan tugas. (4) Kurangnya pemahaman dan sosialisasi. (5) keterbatasan sumber daya manusia (SDM), (6) stigma sosial dan budaya sekolah. (7) ketidakjelasan atau inkonsistensi prosedur pelaporan.

Terhadap kendala tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru dan Komisi X DPR RI mendorong adanya evaluasi berkala terhadap Implementasi dari kebijakan, melakukan pelibatan orang tua dan masyarakat, melakukan sosialisasi, pelatihan dan penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, alokasi anggaran, perlu penyederhanaan prosedur pelaporan dan pemenuhan sumber daya.

Pekanbaru, 30 November 2024

Tim Kunker Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau.